 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL/YANG TIDAK BERSIFAT FINAL	1721 - B1
	NOMOR : H.01 1000000647 H.02 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- 0 H.03 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.04 <input type="checkbox"/> Final H.05 <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Final

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP	:	470678491514000 / 3276072202830002
A.2 NITKU	:	3276072202830002000000
A.3 NIK	:	-
A.4 Nama	:	ANDOYO


B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
07-2024	21-100-07	15.120.000	7.560.000	0	5	378.000

B.8 Nomor Dokumen Referensi Fasilitas : -

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1 NPWP Instansi Pemerintah	:	002877165025000 / 0002877165025000
C.2 NITKU	:	000287716502500000000000
C.3 Nama Instansi Pemerintah	:	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA PROVINSI DKI JAKARTA
C.4 ID Subunit Organisasi	:	00287716502500000000
C.5 Tanggal	:	<div>11</div> dd <div>02</div> mm <div>2025</div> yyyy
C.6 Nama Penandatanganan	:	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA PROVINSI DKI JAKARTA
C.7 Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.



95NMZRT9

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah.